

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat, agar benar-benar menjadi wadah perjuangan masyarakat miskin yang mandiri, serta berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial ekonomi maupun lingkungan termasuk perumahan dan pemukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud juga dititikberatkan pada upaya perannya sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan, serta kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan ini diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan yang pada gilirannya antara lain tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam pemukiman yang lebih responsive, dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha memerlukan modal untuk membeli alat-alat atau perlengkapan yang semakin modern. Bagi pelaku usaha perikanan membeli sarana peralatan yang modern dapat menimbulkan masalah karena sebagian tidak sanggup mendanai usahanya yang padat modal dengan dana sendiri. Suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang diharapkan juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang

diperoleh rendah. Permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan kini telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha bidang perikanan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat di pedesaan.

Pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam terciptanya sebuah negara, pemerintah dibutuhkan dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pembangunan, sosial, hukum maupun segala bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah atau bahkan Desa. Dalam prinsipnya konsep pemerintahan yang baik atau *Good Governance* tidak akan pernah lepas dengan 3 sektor utama yaitu antara lain *state* (Negara atau Pemerintah), *society* (masyarakat) *and private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dijalankan, tak jarang pemerintah seringkali berjalan secara berdampingan dengan cara berkolaborasi atau bekerjasama dengan kelompok kepentingan lain untuk mencapai target pelaksanaan program pemerintahan yang ingin dicapai. Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat misalnya, merupakan salah satu wujud kerjasama atas kepedulian pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan kreatif.

Kelompok Tani Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Himalaya misalnya, kelompok ini adalah salah satu kelompok budidaya ikan air tawar yang ada di Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan bantuan dana APBD Kabupaten Tasikmalaya dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2019. Pertama kali didirikan Pokdakan Himalaya memiliki 10 Anggota kemudian berkembang saat ini menjadi 30 anggota dengan luas kolam 7.240 m². Sistem pengairan yang dipergunakan

adalah pengairan Irigasi teknis dan sumber air berasal dari aliran sungai, sehingga debit air dapat mengaliri seluruh kolam yang ada.

Keberhasilan yang dilakukan oleh Pokdakan Himalaya ini juga tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan pemerintah sebagai aktor kolaborasi untuk memberdayakan masyarakatnya dengan upaya terjun langsung meninjau kegiatan masyarakat yang dilakukan. Meskipun telah terwujud kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Desa Sukamahi dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Akan tetapi wujud kerjasama atau kolaborasi ini masih ada saja masalah mendasar yang masih sering terjadi antara lain seperti pola koordinasi yang masih belum berjalan secara baik dan wujud apresiasi yang diberikan kepada kelompok-kelompok UKM sering kali tidak tepat sasaran. Kerjasama antara UKM dengan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan karena hal ini akan menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Pokdakan Himalaya merupakan proyek percontohan dalam budi daya ikan air tawar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berdiri sejak Tahun 2017. Adapun hasil produksi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Produksi Pokdakan Himalaya

Tahun	Jenis Ikan (dalam Kilogram)			Jumlah (Kilogram)	Prosentase Peningkatan (%)
	Gurame	Mujair	Nila		
2017	540	250	4800	5590	12,22
2018	680	270	5500	6450	15,38
2019	740	230	6400	7370	14,26
2020	780	260	7100	8140	10,45

Sumber: Pokdakan Himalaya. 2020

Tabel 1 menunjukkan hasil produksi ikan dari Pokdakan Himalaya. Tahun 2019 Pokdakan Himalaya menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupa 5000 ekor bibit ikan gurame, pakan 3 ton, kapur 9 karung, jarigen 12 pcs, kemudian 25.000 ekor bibit ikan nila Sukabumi. Bantuan tersebut seharusnya menjadi sebuah dorongan untuk meningkatkan hasil produksi, namun penggunaannya kurang dimaksimalkan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil produksi, yang peningkatannya tidak berbeda jauh dari tahun-

tahun sebelum mendapatkan dana hibah, bahkan prosentase peningkatannya cenderung menurun pada 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, diperoleh data bahwa bantuan DAK belum digunakan secara efektif oleh Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya, hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala, antara lain:

1. Kemampuan anggota Pokdakan Himalaya dalam budidaya ikan masih dilakukan secara tradisional. Seperti pengelolaan sirkulasi air yang hanya mengandalkan masuknya air dari sungai, sehingga debit airnya akan berkurang pada musim kemarau.
2. Kemampuan pembudidayaan ikan masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil produksi yang tidak signifikan setelah mendapat bantuan dana hibah.

Belum efektifnya pengelolaan bantuan dana hibah pada Pokdakan Himalaya, diduga karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak terkait, antara lain:

1. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Kelompok dengan anggotanya terkait penerimaan bantuan.
2. Tidak jelasnya pembagian kerja, seperti belum adanya tenaga ahli budidaya perikanan yang memberikan pelatihan kepada anggota Pokdakan Himalaya.
3. Kurangnya kesatuan tindakan dari Ketua Kelompok dengan anggota Pokdakan Himalaya dalam pengelolaan budidaya ikan.
4. Kurangnya tanggungjawab pengelola, seperti kurangnya pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok dan Dinas terkait.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Kelompok Budi Daya Ikan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tiap dimensi dalam koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Koordinasi dan efektivitas kerja Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pengaruh tiap dimensi dalam koordinasi terhadap efektivitas kerja Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya
3. Pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja Pokdakan Himalaya Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai manajerial kelompok budidaya ikan.
2. Untuk memberikan masukan serta bahan kepustakaan pada Program Studi Magister Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya, khususnya mengenai koordinasi dalam kelompok budidaya ikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Ketua Kelompok budidaya ikan atau kelompok tani lainnya terutama kaitannya dengan koordinasi guna meningkatkan kinerjanya.